

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bukan hanya hak yang tertulis di atas kertas. Pendidikan adalah jaminan nyata yang harus bisa dirasakan oleh setiap warga negara, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional yang dimilikinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati keberagaman peserta didik.¹ Artinya, negara tidak memberikan pengecualian: seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, bukan sekadar layanan yang tersedia secara seragam.

Salah satu wujud nyata dari pemenuhan hak tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lain di satuan pendidikan reguler, dengan dukungan, penyesuaian, dan akomodasi yang diperlukan².

Namun, penting untuk digarisbawahi sejak awal, keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa dinilai hanya dari sisi penerimaan. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per September 2023 mencatat lebih dari 40 ribu sekolah, baik jenjang dasar maupun menengah, telah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dan Jakarta termasuk daerah yang cukup aktif hingga ke level sekolah dasar.³ Akan tetapi, angka sebesar itu perlu dibaca dengan hati-hati. Bagi sekolah negeri, menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada dasarnya adalah kewajiban

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Sukadari, *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2019), h. 11.

³ Antara, "Jumlah Sekolah Inklusi Terus Bertambah, Pemerintah Siapkan Guru Pendamping Khusus," *Tempo*, 5 Oktober 2023.

administratif. Sementara itu, memastikan bahwa peserta didik tersebut benar-benar mengakses pembelajaran, berpartisipasi dalam kegiatan kelas, dan berkembang secara optimal, adalah persoalan lain yang jauh lebih kompleks dan tidak otomatis mengikuti status "sekolah penyelenggara inklusif".

Dari semua pihak yang terlibat, guru kelas adalah pihak yang paling menentukan. Gurulah yang merencanakan tujuan dan kegiatan pembelajaran, mengenali kebutuhan belajar peserta didik, memilih metode dan media, melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil belajar setiap hari. Berbeda dari guru mata pelajaran di jenjang yang lebih tinggi, guru kelas sekolah dasar tidak hanya mengajar satu bidang, melainkan mengelola keseluruhan proses belajar peserta didiknya, sehingga ia berhadapan langsung dengan variasi kemampuan, kecepatan belajar, komunikasi, perhatian, interaksi sosial, dan kebutuhan dukungan yang berbeda-beda dalam satu kelas yang sama. Dalam kondisi seperti ini, keputusan pedagogis guru, bukan kebijakan sekolah di atas kertas yang pada akhirnya menentukan sejauh mana setiap peserta didik memperoleh kesempatan nyata untuk terlibat dan belajar.⁴

Yang menjadi dasar dari keputusan pedagogis tersebut adalah pemahaman guru itu sendiri, dan di sinilah perlu ada kejelasan sejak awal mengenai apa yang dimaksud dengan "pemahaman" dalam penelitian ini. Pemahaman yang dimaksud bukan sekadar kemampuan mengingat atau menyebutkan istilah seperti "pendidikan inklusif", "asesmen", atau "diferensiasi pembelajaran". Merujuk pada taksonomi kognitif Anderson dan Krathwohl, pemahaman adalah kemampuan menangkap makna suatu informasi, kemudian menjelaskan, mencontohkan, mengklasifikasikan, membandingkan, menyimpulkan, dan menghubungkannya dengan konteks yang dihadapi.⁵

Dengan kata lain, seorang guru dapat saja mengetahui istilah "asesmen kebutuhan belajar", tetapi baru dapat dikatakan memahami apabila ia mampu menjelaskan mengapa asesmen itu penting, membedakan bentuk asesmen yang

⁴ Brissino, O. (2021). Building capacity for inclusive teaching: Policies and practices to prepare all teachers for diversity and inclusion. OECD Education Working Papers, No. 256

⁵ Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl, eds., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Longman, 2001).

sesuai untuk kebutuhan yang berbeda, dan menghubungkannya dengan keputusan pembelajaran yang ia ambil di kelas. Penegasan ini penting agar sejak awal jelas bahwa penelitian ini mengukur dimensi kognitif guru, bukan kesiapan, bukan sikap, dan bukan pengamatan langsung terhadap praktik mengajarnya di kelas.

Salah satu mata pelajaran yang paling menuntut kelengkapan pemahaman semacam itu adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Di sekolah dasar, IPAS bukan sekadar pelajaran hafalan, melainkan pembelajaran yang mengajak peserta didik mengamati, mengeksplorasi lingkungan, memecahkan masalah, memahami hubungan sebab-akibat, dan menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman sehari-hari. Karakter pembelajaran seperti ini memadukan unsur yang konkret (dapat dipahami lewat pengamatan langsung) dan unsur yang abstrak (menuntut kemampuan menghubungkan informasi, membaca data, dan menarik makna dari suatu fenomena).

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, perpaduan ini bisa menjadi peluang sekaligus hambatan, tergantung sepenuhnya pada bagaimana guru menyampaikannya. Penjelasan verbal yang panjang, instruksi tanpa tahapan, tugas dengan tingkat kompleksitas yang seragam, atau evaluasi tanpa penyesuaian dapat membuat peserta didik berkebutuhan khusus tertinggal bukan karena mereka tidak mampu memahami konsepnya, melainkan karena cara penyampaiannya tidak dapat mereka akses.

Sebaliknya, penggunaan benda konkret, visual, demonstrasi, pengulangan, pemecahan tugas menjadi langkah-langkah kecil, dan bentuk evaluasi yang beragam dapat membuka akses tersebut. Dengan demikian, guru yang mengajar IPAS di kelas inklusif dituntut lebih dari sekadar menguasai materi, ia perlu memahami bagaimana materi itu disesuaikan bagi peserta didik dengan kebutuhan yang berbeda-beda, dan risiko dari ketidakpahaman ini bukan hanya nilai akademik yang rendah, melainkan peserta didik yang merasa tidak dilihat dan tidak diakomodasi dalam kelasnya sendiri.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya posisi pemahaman guru dalam pembelajaran IPAS inklusif, tetapi penting juga ditegaskan bahwa sejauh

ini belum ada gambaran empiris dan terukur mengenai seberapa dalam pemahaman tersebut, khususnya di lapangan tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan pada beberapa SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cakung, ditemukan adanya variasi pengalaman guru dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus.

Sebagian guru menyampaikan bahwa pembelajaran IPAS memerlukan penjelasan yang lebih konkret, media yang lebih beragam, dan pendampingan yang lebih intensif, sementara di sisi lain mereka juga menghadapi kondisi kelas dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak, keterbatasan waktu, serta ketersediaan sumber belajar yang tidak selalu memadai. Temuan awal ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa guru secara umum memiliki pemahaman yang rendah, kesimpulan semacam itu justru terlalu dini dan tidak berdasar apabila belum diukur secara sistematis. Yang justru terlihat dari studi pendahuluan ini adalah adanya kesenjangan informasi, sekolah sudah menyangang status penyelenggara inklusif, guru sudah punya pengalaman menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi belum ada data yang menunjukkan secara terukur bagian mana dari pemahaman guru yang sudah kuat dan bagian mana yang masih memerlukan penguatan.

Kondisi inilah yang mengarah pada masalah utama penelitian ini. Guru kelas menjadi penentu utama keberhasilan pembelajaran IPAS inklusif melalui keputusan pedagogis yang diambilnya sehari-hari, namun sejauh ini belum diketahui secara terukur seberapa dalam pemahaman guru terhadap keenam aspek yang menjadi dasar dari keputusan tersebut, mulai dari mengenali karakteristik peserta didik, melakukan asesmen, menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, hingga memahami prinsip inklusi itu sendiri. Tanpa pemetaan yang jelas, upaya penguatan kompetensi guru, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun kebijakan sekolah, berisiko dirancang secara pukol rata, padahal kebutuhan penguatan pada tiap aspek mungkin saja berbeda-beda.

Penelitian Siti Nurul Komariyah, Riana Bagaskorowati, dan Leliana Lianty tentang Pemahaman Guru terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Wilayah Kepulauan Seribu Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru mengenai karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus masih belum optimal. Sebagian guru telah memahami konsep dasar pendidikan inklusif, namun masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi karakteristik anak berkebutuhan khusus. memilih strategi pembelajaran yang sesuai, dan melakukan penyesuaian pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan agar pembelajaran inklusif berjalan lebih efektif.⁶

Penelitian lain oleh Mohammad Archi Maulyda dkk. yaitu Pemahaman Guru Sekolah Dasar tentang Pembelajaran Inklusif: Studi Kasus di SDN Repok Puyung menunjukkan bahwa pemahaman guru tentang pembelajaran inklusif masih rendah, terutama mengenai konsep pendidikan inklusif, identifikasi profil belajar ABK, adaptasi pembelajaran, dan penataan kelas. Penelitian menyimpulkan bahwa guru memerlukan peningkatan kompetensi sebelum pendidikan inklusif dapat diterapkan secara optimal.⁷

Guru dituntut untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran, penggunaan media, serta bentuk evaluasi agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut keberhasilan pembelajaran inklusif sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam melakukan kolaborasi dan penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.⁸

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan pembelajaran inklusif sebagai konteks umum, atau berfokus pada kesiapan dan

⁶ Siti Nurul Komariyah, Riana Bagaskorowati, dan Leliana Lianty, "Pemahaman Guru terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Wilayah Kepulauan Seribu," *PARAMETER: Jurnal Pendidikan* 29, no. 2 (2017): 216–228.

⁷ Mohammad Archi Maulyda dkk. "Pemahaman Guru Sekolah Dasar tentang Pembelajaran Inklusif: Studi Kasus di SDN Repok Puyung, Lombok Tengah," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 7, no. 2 (2021): 494–513.

⁸ Paju, B., Kajamaa, A., Pirttimaa, R., & Kontu, E., "Collaboration for Inclusive Practices: Teaching Staff Perspectives from Finland," *Scandinavian Journal of Educational Research* 66, no. 3 (2022): 427–440.

kompetensi guru secara luas, tanpa menguraikannya ke dalam aspek dan indikator yang terukur pada satu mata pelajaran tertentu. Di sinilah letak kesenjangan penelitian ini: belum banyak studi yang secara khusus memetakan pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan menguraikannya ke dalam aspek dan indikator yang jelas, terlebih pada konteks sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman guru memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kesiapan guru, implementasi pendidikan inklusif secara umum, atau kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif. Penelitian yang secara khusus membahas pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif masih relatif terbatas, khususnya pada konteks sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran empiris mengenai pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri penyelenggara pendidikan inklusif Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Mencakup kecenderungan pemahaman secara keseluruhan, per aspek, dan per indikator. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi guru dan sekolah, sekaligus menjadi dasar yang lebih terarah dalam merancang penguatan kompetensi guru pada bagian-bagian yang memang membutuhkannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka identifikasi masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman guru kelas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran IPAS di sekolah inklusif?

2. Bagaimana pemahaman guru kelas mengenai penyesuaian pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik?
3. Bagaimana pemahaman guru kelas mengenai penggunaan media pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus?
4. Bagaimana pemahaman guru kelas mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik?
5. Bagaimana pemahaman guru kelas mengenai prinsip pembelajaran inklusif dalam pembelajaran IPAS?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memberikan batasan pada penelitian berupa:

1. Penelitian ini dibatasi pada pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
2. Peserta didik dalam penelitian ini dibatasi pada anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
3. Penelitian difokuskan pada pemahaman guru kelas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus, penyesuaian pembelajaran IPAS, penggunaan media pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, serta prinsip pembelajaran inklusif dalam pembelajaran IPAS.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cakung Jakarta Timur?”

E. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan data empiris mengenai pemahaman guru kelas dalam pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Cakung Jakarta Timur, serta mengidentifikasi bagaimana pemahaman tersebut tercermin dalam pembelajaran di kelas inklusif.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman guru kelas dalam pelaksanaan pembelajaran.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa pihak, di antaranya:

a. Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

b. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pemahaman guru dalam menyesuaikan pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pembelajaran IPAS bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPAS dan pendidikan inklusif.

